



Konstruksi Identitas Progresif Arab Saudi melalui Kepemimpinan di UNCSW

(Analisis Konstruktivis)

Jesisca Amanda Florantika

Universitas Gadjah Mada, Indonesia

*Penulis Korespondensi: jesiscaamandaflorantika2001@mail.uqm.ac.id

Abstract. Saudi Arabia's involvement in the United Nations Commission on the Status of Women (UN CSW) has drawn criticism from most member states because of its apparent contradiction with the ideals of the UN CSW. This study discusses the occurrence of Saudi identity reform in the gender realm, influenced by international norms as the main driver. The study uses a descriptive qualitative method by collecting data sources from various scientific literature to examine the process and efforts of Saudi Arabia to make its progressive image accepted by the global community. Alexander Wendt's Constructivity Theory is used to explore the identity of Saudi Arabia being reconstructed through the interaction of international norms in the UNCSW forum. The research findings indicate that Saudi leadership at the UN CSW reflects an adaptation to international norms and efforts to reconstruct Saudi Arabia's global image as a supporter of gender equality despite domestic challenges. The results of this study provide insights into domestic policies, international pressures, and gender reform in Saudi Arabia, within the context of Saudi leadership at the CSW.

Keywords: Arab Saudi; Constructivism; Leadership; Progressive Identity; UNCSW.

Abstrak. Keterlibatan Arab Saudi dalam platform internasional Komisi Status Perempuan PBB (UN CSW) menuai kritik dari sebagian besar negara anggota karena latar belakangnya yang kontradiktif dengan cita-cita UN CSW. Penelitian ini membahas tentang terjadinya reformasi identitas Saudi dalam ranah gender yang dipengaruhi oleh norma internasional sebagai pendorong utama. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan sumber data dari berbagai literatur ilmiah untuk meneliti proses dan upaya Saudi untuk membuat citra progresifnya diterima masyarakat global. Teori Konstruktivitas Alexander Wendt digunakan untuk mengeksplorasi identitas Arab Saudi yang sedang direkonstruksi melalui interaksi norma internasional di forum UNCSW. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Saudi di UN CSW mencerminkan adaptasi terhadap norma internasional dan upaya untuk merekonstruksi citra global Saudi sebagai pendukung kesetaraan gender meski ada tantangan domestik yang menghambat. Hasil penelitian ini memberikan wawasan terkait kebijakan domestik, tekanan internasional dan reformasi gender di Saudi dalam konteks kepemimpinan Saudi di CSW.

Kata kunci: Arab Saudi; Identitas Progresif; Konstruktivisme; Kepemimpinan; UNCSW.

1. LATAR BELAKANG

Isu gender di Timur Tengah telah lama menjadi sorotan masyarakat Internasional. Arab Saudi menjadi salah satu negara di Timur Tengah dengan kasus pelanggaran hak asasi perempuan tertinggi. Kebijakan pemerintah yang kontroversial hingga peran agama sering dinilai menjadi pemicu terbesar maraknya kasus gender di Arab Saudi (Ashlund t.t.). Fakta tersebut tercatat dalam The Global Gender Gap Index yang menuliskan bahwa Saudi menduduki posisi ke-126 dari 146 negara.

Sebelum reformasi besar-besaran yang dilakukan oleh MBS, Arab Saudi memiliki aturan yang membatasi ruang perempuan dalam banyak hal, seperti larangan mengemudi, larangan berpergian tanpa mahram (kerabat laki-laki) (Mansyuroh 2019). Dalam ruang yang lebih luas, seperti pekerjaan (Alhajri dan Khaja 2025), pendidikan dan keterlibatan peran

perempuan dalam dunia politik (Thompson 2015:15–16), juga dirasakan perempuan Saudi. Dalam beberapa kasus, kekerasan dan pelecehan terjadi dalam rumah tangga. Hal tersebut memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan fisik dan mental perempuan. Perempuan Saudi tidak bisa mengungkapkan kekerasan yang terjadi pada mereka karena terdapat pembatasan hak-hak perempuan, salah satunya adalah pengungkapan kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga. Akibatnya, akses perawatan dan dukungan untuk korban menjadi terhambat dan menimbulkan masalah yang serius (Alshammari, Evans, dan Mcgarry 2023:502).

Setelah reformasi besar-besaran, pada tahun 2018, pemerintah Saudi telah mencabut larangan mengemudi dan pada tahun 2019 larangan berpergian sendiri dicabut. Perempuan mulai mendapatkan peran aktif di ruang publik, seperti yang terjadi di sektor pariwisata, kesehatan, dan beberapa sektor lainnya (Khan dkk. 2025:487). Arab Saudi juga telah memulai perubahan terhadap hak-hak perempuan, seperti pada kodifikasi hukum status pribadi atau *Personal Status Law* (PSL) yang disahkan pada 2022 untuk mengatur masalah keluarga dan pernikahan. Kodifikasi hukum ini dapat dilihat sebagai transformasi signifikan bagi hukum tradisional Arab Saudi dan menggambarkan adanya upaya modernisasi negara (Polok dan Zubair 2024). Melihat fakta yang ada, Saudi telah melakukan beberapa usaha untuk mencapai visinya. Arab Saudi masih tergolong sebagai negara yang minim perhatian terhadap hak-hak perempuan dari berbagai aspek, yaitu aspek sosial, ekonomi dan politik.

Pada tahun 2024, tepatnya pada tanggal 27 Maret, Saudi terpilih menjadi pemimpin *Commission on the Status of Women* (CSW) atau Komisi Status Perempuan di PBB (Schaer 2024). Kepemimpinan Saudi dalam CSW menuai banyak kritik dan protes dari beberapa anggota lembaga, salah satunya adalah Louis Charbonneau, direktur PBB di Human Rights Watch (HRW). Menurutnya, protes dan kritik terjadi karena Saudi belum memenuhi kriteria untuk memimpin komisi ini dengan catatan yang buruk terkait kesetaraan gender dan hak-hak perempuan (Rahmayani 2024). Menurut beberapa anggota yang kontra terhadap posisi Saudi sebagai ketua komisi, hal itu dikarenakan masih banyak negara yang layak menjadi pemimpin dengan catatan lebih baik mengenai hak-hak perempuan seperti Belanda, Jepang, dan Swiss. Namun, dilihat dari beberapa upaya yang sedang dilakukan Saudi dalam rangka improvisasi dan modernisasi, Saudi mengusung beberapa gagasan besar seperti Arab Vision 2030 dan beberapa gagasan lainnya (Ajie Putra dan Pratama Nurratri T 2024:85).

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini didukung oleh Teori Konstruksi Sosial Alexander Wendt, sebagai landasan ilmiah yang menekankan konstruksi sosial politik internasional. Menurutnya, perilaku negara atau warga negara dibentuk oleh gagasan, norma dan pemahaman intersubjektif yang dianut bersama. Melalui pernyataan tersebut, Wendt mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap dominasi neorealisme sebagai satu-satunya faktor terbesar dalam perilaku negara (Grass 2023:147–50). Wendt menyatakan bahwa struktur sistem internasional tidak selalu berbentuk konfliktual, namun dibentuk oleh interaksi dan pemahaman bersama antarnegara (Rother 2012:51). Prinsip dasar dari teori ini adalah bahwa identitas dan kepentingan negara bukan semata-mata ada, namun ia ada karena ada proses sosial dan interaksi dalam sistem internasional (Soltani, A. Jawan, dan B. Ahmad 2014:154).

Beberapa jurnal telah membahas isu gender di Arab Saudi dari berbagai kasus dan perspektif yang berbeda-beda. Akhmad Saikuddin dan Abdul Karim Amrullah dalam “Dinamika Kesetaraan Gender dan Arah Baru Peran Perempuan Arab Saudi” mengemukakan bahwa kesetaraan gender di Arab Saudi dalam struktur sosial patriarkal dan teologi Wahabi yang ultra-konservatif menunjukkan adanya dinamika yang menyesuaikan dengan kondisi sosial dan kepentingan politik (Saikuddin dan Karim Amrullah 2023:50). Caroline Ashlund dalam tesisnya “The Saudi Elephant in the Room, The Appointment of Saudi Arabia to the Commission of the Status of Women 2018-2022” membahas tentang dampak internasional terhadap UN CSW dan hak perempuan secara global, serta dampak nasional terhadap hak perempuan Saudi atas terpilihnya Arab Saudi menjadi ketua UN CSW periode 2018-2022. Menurutnya, meskipun sebuah kondisi sosial yang berlandaskan budaya yang kuat bisa berubah dengan adanya faktor ekonomi (Ashlund t.t.).

Penelitian relevan lainnya berjudul “Reformasi Hak-Hak Perempuan Arab Saudi Melalui *Saudi Vision 2030* Tahun 2017-2019” oleh Analieza, Setyaningsih dan Halifa yang membahas perubahan signifikan terhadap hak-hak perempuan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Perubahan ini ditujukan untuk mencapai tujuan dari Visi Saudi 2030 agar terhindar dari ketergantungan terhadap minyak dengan melibatkan perempuan dalam dinamika sosial, pendidikan hingga ekonomi (Mufiedah, Harini, dan Haqqi 2021:11). Penelitian selanjutnya berjudul “Perbandingan Implementasi *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* dalam Pemenuhan Hak-Hak Politik dan Ekonomi Perempuan di Arab Saudi dan India” yang ditulis oleh Nurjannah Abdullah dan Muhammad Fajhriyadi Hastira. Berfokus pada Arab Saudi, hasil penelitian ini menyebutkan bahwasanya

untuk menuju kesetaraan gender melalui CEDAW menghadapi benturan dengan kebiasaan, budaya, dan adat (Abdullah dan Fajhriyadi Hastira t.t.:83).

Berdasarkan studi literatur di atas, ada beberapa perspektif yang belum dibahas, yaitu terkait progres penyetaraan gender melalui posisinya di UN CSW dan melihat identitas Arab Saudi di ranah gender. Melihat adanya perspektif yang belum dibahas pada literatur terdahulu, fokus penelitian ini adalah pada kajian konstruktivis atas norma-norma kesetaraan gender di Arab Saudi dan UN CSW. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana kepemimpinan Arab Saudi dalam arena UNCSW berperan dalam proses konstruksi identitas Arab Saudi. Pertanyaan penelitian ini menelusuri bagaimana kepemimpinan Arab Saudi di UN CSW mencerminkan adaptasi terhadap norma internasional kesetaraan gender dan digunakan untuk merekonstruksi identitas Saudi sebagai pendukung kesetaraan gender. Titik berat penelitian ini berada pada peran norma internasional terkait kesetaraan gender dalam forum multilateral.

3. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian studi kasus yang biasanya melibatkan studi terperinci dari kasus tertentu. Dengan teknik pengumpulan data dan analisis data terkait judul penelitian, permasalahan dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti lain dalam proses penelitian dengan tema dan kasus yang sama. Penelitian ini menggunakan Konstruktivitas Alexander Wendt dalam hubungan antrabangsa yang berfokus pada identitas bangsa, kepentingan bangsa dan tindakan atau interaksi suatu negara kepada negara lainnya (Nassif dan Al-Hattash 2024:316). Pisau penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana sebuah identitas dan citra dibangun melalui partisipasi Arab Saudi dalam forum UNCSW melalui norma yang progresif tentang perempuan. Dan menganalisis bagaimana Saudi membangun citra internasionalnya sebagai aktor reformis di bidang hak perempuan dengan berbagai usaha Saudi untuk memodernisasi negaranya, melalui upayanya untuk menyelesaikan permasalahan gender yang ada.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Komisi Status Perempuan PBB/ *United Nations Commission on the Status of Women* (UNCSW)

Komisi Status Perempuan didirikan pada tahun 1946 sebagai lembaga yang mempromosikan, memantau, melaporkan, dan mengevaluasi isu-isu yang sedang terjadi dalam bidang hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan yang berkaitan dengan perempuan (Hannan, Liyambo, dan Brautigam 2019:4). Perkumpulan perdana diadakan di New York

tepatnya di *Lake Success* Februari 1947 silam. Prinsip yang dimiliki oleh organisasi ini adalah mengangkat derajat perempuan tanpa memandang ras, suku, bahasa menuju kesetaraan dengan kaum laki-laki di segala bidang usaha manusia. Selain itu, penghapusan undang-undang yang berkaitan dengan diskriminasi terhadap perempuan dalam aturan atau asas hukum atau dalam adat istiadat. Dilansir dari laman CSW, komisi ini berfokus pada penetapan standar dan perubahan undang-undang yang menuju pada perilaku diskriminasi serta keinginan untuk menumbuhkan kesadaran global tentang isu-isu perempuan di kancah internasional.

CWS terdiri dari beberapa negara yang bergabung dan memiliki tujuan yang sama, beberapa di antaranya adalah Australia, Belarusia, China, Kosta Rika, Denmark, Prancis, Guatemala, India, Meksiko, Suriah, Uni Republik Sosialis Soviet, Inggris Raya, Amerika Serikat, Venezuela dan Turki. Setelah terbentuknya komisi ini, CSW mengupayakan beberapa gagasan untuk mewujudkan kesetaraan gender dengan membentuk beberapa komisi seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), yang berlaku pada tanggal 3 September 1981. CEDAW juga menjadi satu-satunya komisi HAM internasional yang memberikan ruang untuk perempuan seluruh dunia agar terbebas dari perdagangan perempuan dan eksploitasi perempuan (Hannan dkk. 2019:5), Dan ternyata penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan telah lama diadopsi oleh PBB, yaitu sejak 1979 (Rusmarina Dewi, Ihsanul Fikri, dan Febriani 2020:34). Selanjutnya, Konferensi Dunia ke-Empat (*Fourth World Conference on Women*) tentang perempuan dan platform aksi Beijing atau yang biasa dikenal dengan *The Beijing Declaration and Platform for Action* 1995. Kedua organisasi ini berhasil mewujudkan jaminan kesetaraan hak-hak perempuan dengan pria dalam ranah praktik dan hukum serta menunjukkan bahwa perempuan lebih terorganisir secara global setelah adanya organisasi-organisasi ini sejak tahun 1980-an (Hannan dkk. 2019:12).

Selain itu, CSW juga telah mengeluarkan negara anggota dari struktur keanggotaan yang memiliki beberapa masalah dan melanggar peraturan organisasi. Pada Desember 2022, Iran dikeluarkan dari keanggotaan karena pelanggaran yang dilakukan terhadap perempuan. Iran bertanggung jawab atas kematian Mahsa Amini, seorang pengunjuk rasa yang tewas di tangan aparat moral Iran akibat aksinya yang menolak pemakaian jilbab sesuai aturan pemerintah (Ahmad 2023:26–27). Selain itu, rezim Iran juga melakukan tindakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa HAM di Iran sebagai bentuk protes atas kematian Amini. Korban yang tercatat dalam aksi tersebut mencapai 500 korban tewas dan kurang lebih 20.000 orang ditangkap aparat (Wafa Wijayanto t.t.:5–6).

Dalam arti singkat, CSW merupakan komisi fungsional milik Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk pada tahun 1946 dan berperan penting dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan internasional. Merupakan platform global terpenting untuk mendiskusikan isu gender, membuat kebijakan dan mengadvokasi hak-hak perempuan. Beberapa peran utama CWS dalam isu gender seperti penyusunan standar global, sebagai monitor dan evaluator kemajuan negara-negara tentang capaiannya, dan menjadi forum internasional untuk dialog dan lainnya. Dengan melihat perannya yang sangat luar biasa dalam mewujudkan kesetaraan gender, CSW memerlukan ketua organisasi yang memiliki empati terhadap hak-hak perempuan, kompetensi dan konsistensi untuk memperjuangkan cita-cita CSW.

Arab Saudi: Identitas dan Isu Gender

Arab Saudi terkenal dengan dua kota suci milik agama Islam yang disebut *Haramain*, yang meliputi kota Makkah dan Madinah. Saudi juga merupakan negara dengan terminologi yang tidak bisa dipisahkan dari Islam dan segala yang berkaitan dengannya. Hal ini juga menyebabkan adanya pengaruh keislaman terhadap dinamika sosial dan politik di Saudi karena sejak dahulu mereka telah berpegang teguh pada ajaran Islam. Bukti dari besarnya pengaruh Islam terhadap dinamika Saudi terlihat dari sistem politik, sosial, hingga undang-undang yang didasari oleh ajaran Islam (Abdullah dan Fajhriyadi Hastira t.t.:74–75). Hingga pada akhirnya banyak asumsi bertebaran yang mengkambing hitamkan ajaran Islam sebagai sumber dari isu dan masalah gender, terutama tentang hak-hak perempuan.

Isu gender dan masalah mengenai hak-hak perempuan nyatanya telah terjadi jauh sebelum datangnya agama Islam di Tanah Arab. Sebelum Islam datang, perempuan digambarkan sebagai figur problematik (Dimas Prakoso dan Priyoyudanto 2024:111). Dan bangsa Arab sendiri menganut sistem patriarki sejak dahulu, bahkan jauh sebelum Islam muncul di tanah Arab. Sistem yang berarti menempatkan laki-laki memiliki hak dan otoritas lebih di atas perempuan di segala aspek kehidupan sosial. Islam juga telah mengubah banyak hukum yang berbau patriarki dengan memberikan hak-haknya, dan Islam juga memuliakan perempuan, bukan malah mendiskriminasi mereka (Dahlan Rifa'i dan Sakinah 2021:27–37). Jika dilihat dari beberapa pernyataan di atas, anggapan tentang identitas Saudi yang murni lahir dari pengaruh Islam merupakan sebuah anggapan cacat, terlebih pada anggapan dan tuduhan tentang patriarki yang lahir dari rahim Islam.

Patriarki merupakan sebuah budaya yang telah ada sejak zaman nenek moyang yang masih diadopsi oleh masyarakat Saudi khususnya. Faktanya, keterbatasan pergerakan perempuan di berbagai kegiatan adalah bukti adanya pemisah yang spesifik antara laki-laki dan

perempuan (Saikuddin dan Karim Amrullah 2023:52). Beberapa kejadian yang membuktikan adanya kesenjangan gender di Saudi adalah ketidaksetaraan upah antara laki-laki dan perempuan, peran perempuan yang dikesampingkan, larangan keluar negeri tanpa izin wali dan lain sebagainya (Aliffitria t.t.:153–54). Dikutip dari BBC News, hal ini terjadi karena paham Wahabi yang dijadikan dasar dari kebijakan-kebijakan pemerintah sebagai mazhab mayoritas dan mazhab resmi Saudi. Selama Saudi tetap berjalan di atas mazhab Wahabi, selama itu pula perempuan akan merasa hidup di dalam batasan-batasan.

Ini merujuk pada sejarah Saudi yang kontradiktif akibat aliansi politik-agama yang sering menimbulkan pertentangan, seperti pertentangan ulama Wahabi terhadap modernisasi yang akan diusung untuk Saudi. Dengan keadaan yang serba terbatas, perempuan Saudi melakukan aksinya dengan menciptakan sebuah gerakan untuk melawan diskriminasi dan hak-hak mereka yang telah lama tertindas. Beberapa aksi yang dilakukan oleh perempuan Saudi menghasilkan perubahan positif seperti adanya reformasi baru yang memberikan kelonggaran dalam hukum dan kebijakan seperti izin berkendara mobil, kelonggaran batasan liburan, dan lainnya (Anadya Sabrina Putri Kristyafajar dkk. 2024:111–12). Dengan beberapa fakta tersebut, Saudi telah berusaha untuk melakukan modernisasi, khususnya tentang peran perempuan dan kesetaraan gender.

Kepentingan Arab Saudi dalam Forum UNCSW

Permasalahan kesetaraan gender sendiri merupakan salah satu fokus dari permasalahan internasional yang disorot terang oleh PBB, khususnya Komisi Status Perempuan (CSW). Dengan visi dan misi yang sangat besar, yaitu mewujudkan kesetaraan gender di dunia internasional, CSW memerlukan seorang ketua untuk memimpin komisi ini. Dengan pernyataan tersebut, potensi wajib yang dibutuhkan untuk menjadi anggota bahkan ketua adalah peran, potensi, dan kontribusi dalam mewujudkan keadilan hak-hak perempuan di seluruh negara. Namun, di tahun 2024, tepatnya pada tanggal 27 Maret, PBB memutuskan Arab Saudi menjadi pemimpin CSW (Patrio Sorongan 2024). Abdulaziz Mohammed al-Wasel, sebagai Duta Besar Arab Saudi untuk PBB, menjadi pimpinan CSW sampai 2025 esok. Keputusan ini tentu saja tuai banyak kritik dan protes dari negara-negara anggota karena track record Saudi terlalu buruk untuk dijadikan gambaran kesetaraan gender dan kesejahteraan perempuan untuk ke depannya (Schaer 2024).

Kritik ini mungkin muncul akibat kekhawatiran terhadap kepemimpinan Mohammed al-Wasel dari Saudi yang diduga akan membawa pengaruh buruk terhadap kesetaraan gender. Hal ini disimpulkan dari latar belakang Saudi terkait hak-hak perempuan. Harapan para anggota komisi untuk pimpinan CSW adalah mampu meneruskan pekerjaan pendahulunya

dalam memimpin komisi yang cakupannya cukup luas, seperti memajukan tujuan deklarasi Beijing yang dianggap sebagai tonggak penting dalam kesetaraan gender (Schaer 2024). Dilihat dari besarnya peran CSW, Saudi diharuskan untuk melakukan peningkatan terhadap hak-hak perempuan untuk dapat membuktikan komitmennya terhadap reformasi gender dan mampu memberikan dampak yang positif untuk CSW semasa kepemimpinannya.

Dalam kasus yang lain, banyak negara anggota UNCSW yang menyatakan kekhawatiran mereka terhadap komitmen Saudi dalam menyejahterakan perempuan dan memenuhi hak-hak mereka, menimbang permasalahan hak perempuan dan budaya patriarki yang mengakar di Saudi. Kebijakan-kebijakan Saudi untuk menuju kesetaraan mungkin akan mendapat persepsi negatif dari masyarakat global terkait rekam jejak mereka yang belum berhasil dalam menyelesaikan permasalahan hak-hak perempuan di sana. Persepsi negatif tersebut salah satunya terbentuk akibat kekhawatiran masyarakat global terkait nilai-nilai konservatif yang mungkin akan dibawa Saudi ke dalam komisi ini dan memberikan pengaruh yang tidak sesuai dengan tujuan CSW (Schaer 2024).

Penunjukan Arab Saudi sebagai pimpinan CSW telah memunculkan pandangan-pandangan, hipotesis atau identifikasi mengenai pengaruhnya terhadap struktur kekuasaan gender, baik di lingkup nasional maupun internasional. Di satu sisi, hal ini dipandang sebagai sebuah kesempatan bagi Saudi untuk memperlihatkan komitmennya untuk mewujudkan kesetaraan gender yang diiringi dengan reformasi sosial yang tengah mereka jalankan. Di sisi lain, *track record Saudi terkait perlindungan hak-hak perempuan menjadi sebuah momok menakutkan bagi masyarakat internasional yang diidentifikasi akan menghambat tujuan utama CSW*.

Identifikasi di atas membuat Saudi merasa tertantang dan ingin menunjukkan kepada masyarakat global tentang kemampuannya dalam melakukan reformasi gender di Saudi guna mewujudkan cita-cita CSW menuju kesetaraan gender. Upaya tersebut telah dilaksanakan oleh Saudi semenjak kepemimpinan Muhammad bin Salman dalam *Arab Vision 2030* dan merupakan sebuah upaya nasionalisme baru. Berfokus pada pemberdayaan perempuan dan reformasi gender, Arab Saudi rupanya juga memanfaatkan posisinya sebagai ketua UNCSW untuk mempromosikan agenda kesetaraan gender di kancah global dan komitmennya untuk melakukan perubahan domestik. Usaha seperti ini akan membantu Saudi membangun persepsi positif masyarakat global tentang kepemimpinannya di CSW.

Motivasi Arab Saudi dalam kepemimpinan ini, selain untuk memberikan dampak positif secara global dalam ranah hak-hak perempuan, adalah untuk mengonstruksi legitimasi antarbangsa sebagai aktor yang mendukung hak perempuan. Selain itu, Saudi juga ingin

menunjukkan bahwasanya mereka dapat menyesuaikan diri dengan norma internasional tanpa harus menghapus semua norma atau budaya mereka. Untuk ranah ekonomi, tentu saja Saudi ingin mengembangkan keikutsertaan perempuan dalam berbagai sektor ekonomi, pendidikan dan tenaga kerja untuk mendukung diversifikasi pasca-minyak (Ashlund t.t.). Melihat fenomena yang terjadi, Arab Saudi nyata-nya memanfaatkan platform UNCSW untuk mendukung program pelaksanaan Visi Arab 2030 dalam upaya penyetaraan gender. Selain itu, Saudi juga berupaya untuk melakukan diplomasi gender melalui peluang ini, yaitu untuk memperkuat citranya di mata dunia tentang kepeduliannya terhadap hak-hak perempuan sebagai sebuah negara yang progresif dalam isu gender. Meskipun begitu, Arab Saudi juga masih berjuang untuk menghadapi kritik atas tantangan yang tersisa.

Reformasi Gender di Arab Saudi dalam *Arab Vision 2030*

Dinamika gender yang terjadi di Saudi telah lama berlangsung. Motivasi Saudi untuk mencapai kesetaraan gender perlahan diwujudkan dengan beberapa program yang mendorong perempuan untuk andil dan berperan di beberapa sektor sosial maupun ekonomi, salah satunya lewat *Arab Vision 2030*. Program yang berdiri pada tahun 2016 oleh Raja Salman, putra mahkota Arab Saudi, dengan ambisinya yang kuat untuk melakukan transformasi dan modernisasi (Ajie Putra dan Pratama Nurratri T 2024:85–87). Visi ini rupanya tidak hanya mengubah kebijakan-kebijakan internal Saudi, tetapi juga memengaruhi lanskap kebijakan luar negeri Saudi. Usaha ini nyata-nya merupakan sebuah misi Saudi untuk mengubah citra dan posisinya di panggung internasional dengan cara melibatkan peran perempuan di berbagai sektor negara dan beberapa ranah lainnya (Aliffitria t.t.:151–53).

Bukti nyata keterlibatan peran perempuan di Saudi kini terlihat di beberapa sektor sosial, seperti partisipasi mereka dalam bidang pendidikan yang dalam beberapa waktu silam meningkat secara signifikan (Anadya Sabrina Putri Kristyafajar dkk. 2024:113). Nora bint Muhammad al-Fayez selaku Deputi Menteri Pendidikan Saudi dengan bangga mengemukakan bahwa ia akan memperjuangkan tata cara pendidikan untuk perempuan Saudi sesuai nilai-nilai dan prinsip Saudi (Abdul Rahman t.t.). Ini membuktikan bahwa partisipasi perempuan memiliki pengaruh yang baik untuk kepentingan negara. Selain itu, reformasi lain yang terjadi adalah konsep perwalian dan kebijakan ketenagakerjaan yang dampaknya tidak kalah signifikan dengan laporan fakta sebelumnya. Laporan diatas merupakan hasil positif dari upaya yang telah diusahakan Saudi untuk mencapai kesetaraan gender lewat Arab Vision 2030. Visi ini merupakan sebuah kebijakan yang memberikan pengaruh terbesar sepanjang sejarah Saudi (Ajie Putra dan Pratama Nurratri T 2024:87).

Arab Vision 2030 telah berhasil membawa perubahan positif yang signifikan untuk perempuan Saudi. Namun, selain untuk mewujudkan kesetaraan gender, visi ini juga menjadi sebuah alat yang akan digunakan Saudi untuk kepentingannya, yaitu membuka potensi besar untuk mewujudkan negara yang terdiversifikasi, inovatif, dan terdepan di dunia. Visi ini juga merujuk pada ragam sejarah, warisan dan budaya serta lokasi geografis serta ekonominya (Aliffitria t.t.:154–56). Visi ini merupakan sebuah rencana yang secara ambisius diusung oleh Saudi untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap minyak bumi dan mencoba mengembangkan sektor-sektor lainnya seperti pariwisata, pendidikan dan infrastruktur yang mereka raih melalui perhatian mereka terhadap hak-hak perempuan yang terlupakan (Ajie Putra dan Pratama Nurratri T 2024:89). Melalui pernyataan ini, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya reformasi yang dilakukan Saudi sejauh ini dalam mengusung kesejahteraan perempuan salah satunya adalah untuk kepentingan ekonomi negara.

Usaha-usaha yang dilancarkan Saudi sebagaimana dijelaskan di atas akan membantu Saudi untuk menghilangkan persepsi negatif global terhadap dirinya terkait kesetaraan gender dan membantu memperbaiki citranya sebagai ketua CSW. Setelah usahanya dalam merealisasikan kesetaraan gender, Saudi memiliki peluang yang sangat besar untuk membuktikan komitmennya pada reformasi gender di tingkat nasional maupun internasional. Dengan ini, Saudi dapat memanfaatkan CSW sebagai platform internasional untuk merekonstruksi identitasnya yang cenderung buruk di mata Barat terkait isu gender lewat beberapa program yang telah dilaksanakannya.

Seluruh peran Arab Saudi di atas menggambarkan adanya perubahan identitas Saudi dari negara yang menjadikan patriarki sebagai bagian dari budaya mereka yang mengakar kuat menuju modernisasi sosial yang perlahan menjunjung hak-hak perempuan. Hal ini tidak lain merupakan bentuk dari norma internasional yang memengaruhi kebijakan negara tersebut untuk melakukan modernisasi demi mencapai kesetaraan gender dan mendukung kedudukannya sebagai pimpinan CSW. Menurut peneliti, Saudi berhasil memanfaatkan perkembangan norma-norma internasional dan interaksi sosial untuk membentuk suatu kebijakan yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Dengan demikian, citra buruk Saudi akibat isu gender yang ada perlahan akan menghilang dan berubah menjadi citra sebagai negara yang mendukung kesetaraan gender, dan partisipasi Saudi dalam platform internasional ini akan dilihat sebagai bagian dari konstruksi identitas negara yang lebih progresif. Dan jawaban dari persoalan “mengapa Saudi” yang menjadi pemimpin CSW adalah bahwa kepemimpinan itu didasari oleh dinamika politik internasional yang menginginkan modernisasi Saudi lewat

kedudukannya sebagai ketua CSW dan untuk menunjukkan adanya proses kemajuan gender meski selalu ada tantangan domestik yang menghambat proses tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kepemimpinan Arab Saudi di Komisi Status Perempuan PBB (CSW) telah menuai banyak kritik dari masyarakat global, terutama dari perwakilan setiap negara anggota CSW. Meski demikian, Arab Saudi mengupayakan Arab Vision 2030 sebagai bukti nyata keseriusan dalam partisipasinya di CSW. Arab Vision 2030 merupakan sebuah reformasi gender yang berhasil mencapai kemajuan yang signifikan sehingga menjadi sebuah pencapaian yang bisa membantu Saudi berada di panggung internasional di ranah kesetaraan gender. Dengan begitu, dapat dilihat bahwasanya Saudi kini telah beranjak dari tempat tidurnya untuk berperan lebih dalam mencapai kesetaraan gender di tingkat lokal maupun global. Hal ini menjelaskan bahwa telah terjadi reformasi identitas yang diakibatkan oleh adanya pengaruh norma internasional yang mendorong adanya reformasi gender. Partisipasinya di CSW menggambarkan adanya keinginan untuk terlibat dalam perubahan norma global dan kesadaran akan kepentingan reformasi sosial meski upaya tersebut berjalan sangat lambat.

Temuan ini memperkuat pandangan feminis terhadap penekanan pada urgensi partisipasi perempuan dalam dinamika sosial. Kesetaraan gender yang menjadi pembahasan di ranah feminis rupanya telah diperjuangkan oleh lembaga internasional seperti CSW yang menjadi saluran untuk mendukung gerakan ini agar lebih luas lagi. Namun, rupanya Saudi tidak hanya terfokus pada kesetaraan gender saja, terlebih ada kepentingan lain seperti urusan ekonomi negara yang tergolong bisa terbantu dengan adanya peran perempuan yang menjadi salah satu ranah pembahasan kesetaraan gender. Hal ini juga menjadi bukti bahwasanya upaya feminis bisa terjalin lintas negara. Konstruksi identitas dan norma internasional rupanya juga telah memengaruhi beberapa kebijakan Saudi meski norma domestiknya yang berupa budaya patriarki sangat bertentangan dengan norma internasional. Penelitian ini mungkin masih memiliki banyak kekurangan dari sisi pembahasan terkait respons perempuan Saudi atas reformasi tersebut dan eksistensi perubahan nyata dalam kehidupan perempuan Saudi. Namun, secara keseluruhan, artikel ini telah mencoba memberikan wawasan kritis terhadap pengaruh, tantangan, dan peluang yang muncul setelah kepemimpinan Saudi di CSW.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Rahman, M. (t.t.). Noura al-Faez, pembuka jalan bagi wanita. *Kompas*.
- Abdullah, N., & Hastira, M. F. (t.t.). Perbandingan implementasi The Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dalam pemenuhan hak politik dan ekonomi perempuan di Arab Saudi dan India. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 3.
- Ahmad, F., & Mas'odi. (2023). Mahsa Amini, hijab, and mass movements: Reading the Iranian constitution about women in public spaces. *Syura: Jurnal of Law*, 1. <https://doi.org/10.58223/syura.v1i1.38>
- Ajie Putra, P., & Nurratri T., J. P. (2024). Upaya Arab Saudi mewujudkan kesetaraan gender dalam tujuan pembangunan berkelanjutan melalui program Arab Vision 2030. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 15.
- Alhajri, W., & Khaja, K. (2025). Effects of Saudi male authority on women's mental health. *Social Work in Mental Health*, 23(2), 193-209. <https://doi.org/10.1080/15332985.2024.2416152>
- Aliffitria, B. (t.t.). Kebijakan luar negeri Arab Saudi terkait perempuan dalam kerangka Visi 2030. *Icmes*, 7. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v7i2.178>
- Alshammari, A., Evans, C., & McGarry, J. (2023). Nurses' experiences of perceiving violence and abuse of women in Saudi Arabia: A phenomenological study. *International Nursing Review*, 70(4), 501-509. <https://doi.org/10.1111/inr.12859>
- Anadya Sabrina Putri Kristyafajar, C., Clarissa, A., Ramadhan, M. N., Adillah, M. D., & Nisfiani, S. (2024). Keterlibatan perempuan di tengah politik maskulin dalam perspektif politik global, studi kasus: Gulf women in Saudi Arabia. *Kybernology*, 2. <https://doi.org/10.71128/kybernology.v2i1.99>
- Ashlund, C. (t.t.). The Saudi elephant in the room: The appointment of Saudi Arabia to the Commission on the Status of Women 2018-2022. Lund University, Lund, Swedia.
- Dahlan Rifa'i, S., & Sakinah, H. (2021). Islam dan gender: Relevansi pembaharuan Islam bidang keluarga dan tuntutan egaliter. *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 4. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7017>
- Dimas Prakoso, M., & Priyoyudanto, F. (2024). Peran gender dalam masyarakat Arab pra-Islam. *Morfologi*, 2. <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i2.446>
- Grass, K. (2023). Alexander Wendt's 'Social theory of international politics': A realist critique. *Perspectives on Political Science*, 52(3), 145-150. <https://doi.org/10.1080/10457097.2023.2218138>
- Hannan, C., Liyambo, A., & Brautigam, C. (2019). *A short history of the Commission on the Status of Women*. New York: the Intergovernmental Support Division of UN Women.
- Khan, S., Aloulou, W. J., Shahab, S., & Aliani, K. (2025). Women's participation in operational and high managerial positions in family businesses: Evidence from Saudi context. *Strategic Change*, 34(3), 477-491. <https://doi.org/10.1002/jsc.2634>
- Mansyuroh, F. A. (2019). Analysis of legal change for women traveling without mahram: A case study of the Kingdom of Saudi Arabia Royal Decree No. M/134 of 2019. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 14(2), 201-220. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v14i2.2785>

- Mufiedah, A. I., Harini, S., & Haqqi, H. (2021). Reformasi hak-hak perempuan Arab Saudi melalui Saudi Vision 2030 tahun 2017-2019. *Solidaritas*, 4(3).
- Nassif, W. K., & Al-Hattash, N. M. A. (2024). Social international politics. *South Eastern European Journal of Public Health*, 306-319. <https://doi.org/10.70135/seejph.vi.1071>
- Polok, B., & Zubair, A. (2024). Transformation of tradition: The codification of personal status law in the Kingdom of Saudi Arabia. *Manchester Journal of Transnational Islamic Law & Practice*, 20.
- Rahmayani, Y. (2024). Pegiat HAM internasional tolak Arab Saudi jadi ketua Komisi Perempuan PBB, karena apa? *MU4 Media Berkemajuan*.
- Rusmarina Dewi, N., Ihsanul Fikri, A., & Febriani, A. (2020). Dinamika kesetaraan gender di Arab Saudi: Sebuah harapan baru di era Raja Salman. *Sospol Jurnal Sosial Politik*, 6. <https://doi.org/10.22219/sospol.v6i1.11208>
- Saikuddin, A., & Amrullah, A. K. (2023). Dinamika kesetaraan gender dan arah baru peran perempuan Arab Saudi. *Center of Middle Eastern Studies*.
- Schaer, C. (2024, March 3). Apa rencana Arab Saudi pimpin Komisi Perempuan PBB? *DW news*.
- Soltani, F., Jawan, J. A., & Ahmad, Z. B. (2014). Constructivism, Christian Reus-Smit, and the moral purpose of the state. *Asian Social Science*, 10(10), 153. <https://doi.org/10.5539/ass.v10n10p153>
- Sorongan, T. P. (2024, March 28). Arab Saudi pimpin Komisi Status Perempuan PBB, lembaga HAM ragu. *CNBC Indonesia*.
- Thompson, M. C. (2015). Saudi women leaders: Challenges and opportunities. *Journal of Arabian Studies*, 5(1), 15-36. <https://doi.org/10.1080/21534764.2015.1050880>
- Wijayanto, N. W. (t.t.). Kematian Mahsa Amini dan post-Islamisme: Gerakan sosial masyarakat Iran dan perempuan Iran. *UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*